



LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
(INDONESIAN INSTITUTE OF SCIENCES)

SASANA WIDYA SARWONO

Jl. Jenderal Gatot Subroto No.10, Jakarta, Indonesia, 12710

Telp. 021-52511831. Whatsapp 08118612349

Email : kepala@mail.lipi.go.id

Nomor : B-11046/K/UM.01/XII/2020
Lampiran : Satu halaman
Hal : Konsekuensi Tidak menjadi Anggota
Himpunan Peneliti Indonesia (Himpenindo)

Jakarta, 11 Desember 2020

Yth. Daftar Nama Terlampir

di

tempat

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan terkait lainnya, sebagai berikut.

1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Paragraf 15 tentang Organisasi Profesi, Pasal 101 ayat (2) Setiap pejabat fungsional wajib menjadi anggota organisasi profesi JF .
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Peneliti Bab XVII Organisasi Profesi, Pasal 39 ayat (2) Setiap Peneliti wajib menjadi anggota organisasi profesi jabatan Fungsional Peneliti;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil BAB XIV Organisasi Profesi, Pasal 70 ayat (3) Pejabat Fungsional wajib menjadi anggota organisasi profesi JF.
4. Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti, Bab XVI Organisasi Profesi, Pasal 101(1) Peneliti wajib menjadi anggota Profesi Jabatan Fungsional Peneliti yang mendapatkan pengakuan dari Instansi Pembina;
5. Keputusan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 171/M/2018 tentang Himpunan Peneliti Indonesia (Himpenindo) sebagai Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Peneliti, tanggal 10 Oktober 2018; dan
6. Surat Edaran Kepala LIPI Nomor B-9431/K/UM/VIII/2019 tentang Kewajiban Peneliti menjadi Anggota Himpenindo, tanggal 15 Agustus 2019.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan di atas, maka:

- a. Surat Rekomendasi dan/atau Nota PAK kenaikan jabatan/pangkat, promosi, perpindahan jabatan, dan pengangkatan kembali akan diterbitkan bagi yang telah lulus uji kompetensi dan menjadi anggota Himpenindo aktif.
- b. Naskah orasi Profesor Riset akan diproses bagi yang telah memenuhi ketentuan berlaku dan menjadi anggota Himpenindo aktif.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kepala
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia



Laksana Tri Handoko

Tembusan:

1. Sekretaris Utama – LIPI
2. Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan – LIPI
3. Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia – LIPI, dan
4. Ketua Himpenindo

Daftar Lampiran

Surat Nomor : B-11046/K/UM.01/XII/2020

Tanggal : 11 Desember 2020

1. Kepala Biro Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum - Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
2. Kepala Pusat Penelitian, Promosi, dan Kerja Sama - Badan Informasi Geospasial (BIG)
3. Kepala Pusat Pengkajian dan Penelitian Kepegawaian - Badan Kepegawaian Negara (BKN)
4. Kepala Biro Kepegawaian - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
5. Kepala Pusat Penelitian, Data, dan Informasi - Badan Narkotika Nasional (BNN)
6. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan - Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG)
7. Kepala Biro Umum - Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)
8. Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi - Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
9. Kepala Biro Kepegawaian - Badan Pusat Statistik (BPS)
10. Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum - Badan Standardisasi Nasional (BSN)
11. Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi - Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)
12. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian - Badan Pertanahan Nasional (BPN RI)
13. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan - Kejaksaan Agung
14. Kepala Biro Sumber Daya Manusia- Kementerian Energi Dan Sumberdaya Mineral
15. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan - Kementerian Agama
16. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan - Kementerian Dalam Negeri
17. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan - Kementerian Hukum dan HAM
18. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan dan Inovasi - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
19. Sekretaris Badan Riset dan Sumber Daya Manusia - Kementerian Kelautan dan Perikanan
20. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan - Kementerian Kesehatan
21. Sekretaris Badan Kebijakan Fiskal - Kementerian Keuangan
22. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia - Kementerian Komunikasi dan Informatika
23. Asisten Deputi Urusan Penelitian UKM - Kementerian Koperasi dan UKM
24. Sekretaris Deputi Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan - Kementerian Pariwisata
25. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
26. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
27. Sekretaris Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan - Kementerian Perdagangan
28. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan - Kementerian Perhubungan
29. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Industri - Kementerian Perindustrian
30. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan - Kementerian Pertahanan
31. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian - Kementerian Pertanian
32. Sekretaris Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial - Kementerian Sosial
33. Sekretaris Badan Litbang, Diklat, dan Informasi - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
34. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan dan Informasi - Kementerian Ketenagakerjaan
35. Kepala Biro Dukungan Pemajuan HAM – Komnas HAM
36. Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Umum - Lembaga Administrasi Negara (LAN)
37. Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
38. Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum - Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)
39. Kepala Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan - Mahkamah Agung (MA)
40. Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi Kepaniteraan - Mahkamah Konstitusi (MK)
41. Kepala Pusat Penelitian, Badan Keahlian – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
42. Kepala Lembaga Biologi Molekuler - Lembaga Eijkman
43. Sekretariat Jenderal – Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
44. Sekretariat Jenderal – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
45. Direktur Penelitian dan Pengembangan - Badan Keamanan Laut (Bakamla)
46. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota